

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut P.J.A Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan. (Diaz Priantoro, 2012:1)

Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R., Pajak adalah suatu pengalihan sektor swasta ke sektor Pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar Pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. (Diaz Priantoro, 2012:1)

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2012:1)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang .

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang mengatur tentang ketetapan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provision Jawa Timur Nomor 9 Tentang Pajak Daerah.
- d. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 1105 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa Perda Pajak Daerah.

## **2.2 Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2011:12) Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mendefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.2.1 Fungsi Pajak**

Fungsi budgetair, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

Fungsi reguler, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.

Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

### **2.2.2 Ciri Pajak**

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), menurut Sukrisno Agoes (2010:4) ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan : "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang ."

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

### **2.2.3 Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:5), jenis pajak dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Berdasarkan Golongannya:
  - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2.2.4 Azas Pengenaan Pajak**

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan Undang-Undang .

Untuk dapat menyusun suatu Undang-Undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenang untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Menurut Mardiasmo (2009:7) asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas

domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

2. Asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama,

kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting.

Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (*world-wide income*), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus. Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya.

Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi. Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (*resident individual*) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang



penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (*non-resident*) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang. Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.

#### 1. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.  
Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

#### 2. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah

## **2.3. Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.3.1. Kendaraan Bermotor**

Adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy atau menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat besar yang operasi nya menggunakan roda dan motor, dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **2.3.2. Objek Pajak (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)**

Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **2.3.3 Dikecualikan Sebagai Objek Pajak**

Menurut Undang-Undang No.28 (2009:3.3) peraturan pajak daerah pasal.4 ayat 4 dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah :

- a. Keretaapi
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Kedaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

### **2.3.4 Subjek Pajak (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)**

Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

1. DPP PKB adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum
3. Apabila harga pasaran umum diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
  - a. Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor;
  - b. Penggunaan kendaraan bermotor, yang dihitung berdasarkan factor tekanan gandar, jenis bahan bakar, jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri kendaraan bermotor;
  - c. Jenis kendaraan bermotor;
  - d. Merek kendaraan bermotor;
  - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor;
  - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
  - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

### **2.3.5 Dasar Pengenaan PKB**

Dasar pengenaan PKB sudah ditetapkan dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor

- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalur umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

**Bobot x NJKB**

(UU 28 th.2009 Psl.5 ayat 1, Perda.Pajak Daerah Psl.6 ayat1)

PKB = pajak kendaraan bermotor besarnya 1,5% dari nilai jual motor/mobil dan bersifat menurun tiap tahun, karena penyusutan nilai jual motor/mobil.

SWDKLLJ = Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, sumbangan ini dikelola oleh jasa raharja sebesar RP35.000 untuk motor, Rp 143.000 untuk Mobil

Contoh menghitung perkiraan pajak Toyota xxx (Baru):

NJKB : Rp.198.000.000

PKB = NJKB x 1,5% (Mobil Pertama)

= Rp.2.970.000

Kemudian PKB mobil Toyota xxx Rp.2.970.000 + SWDKLLJ Rp.143.000 =

Rp.3.113.000 (pajak yang harus dibayar)

Kemudian untuk PKB kendaraan roda dua yang usianya diatas 25 tahun dasar pengenaannya adalah :

**Bobot x 50% NJKB**

(Perda.PajakDaerah Psl.6 ayat19)

NJKB : Rp.5.000.000

$$\begin{aligned}\text{PKB} &= 50\% \text{NJKB} \times 1,5\% \\ &= \text{Rp.2.500.000} \times 1,5\% \\ &= \text{Rp.37.500}\end{aligned}$$

Kemudian PKB Honda xxx Rp.37.500 + SWDKLLJ Rp.35.000 = Rp.72.500 (pajak yang harus dibayar)

### 2.3.6 Tarif Progresif

- a. Menurut Undang-Undang No.28 (2009:6.2) Peraturan Pajak Daerah Pasal 8 Ayat 1 Kendaraan bermotor pribadi roda empat serta kendaraan bermotor roda dua yang isi silinder 250cc keatas, kepemilikan ke dua dan seterusnya dikenakan tarif progresif.
- b. Menurut Undang-Undang No.28 (2009:6.2) Peraturan Pajak Daerah Pasal 8 Ayat 3 Pengenaan tarif secara progresif didasarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor atas nama dan/atau alamat yang sama.
- c. Besarnya tarif progresif menurut Undang-Undang No.28 (2009:6.2) Peraturan Pajak Daerah Pasal 8 ayat 1 :
  1. Kepemilikan pertama 1,5%
  2. Kepemilikan kedua 2%
  3. Kepemilikan ketiga 2,5%
  4. Kepemilikan keempat 3%
  5. Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%
- d. Besarnya tarif berdasarkan golongan :

1. 1,5% Kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi atau badan.
  2. 1,0% Untuk kendaraan bermotor angkutan umum
  3. 0,55 % Untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.
  4. 0,2% Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- e. Yang dikenakan tarif progresif adalah :
- Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif :
1. Sedan dan sejenisnya
  2. Jeep dan sejenisnya
  3. Station wagon dan sejenisnya
  4. Minibus dan sejenisnya
  5. Microbus dan sejenisnya
  6. Double cabin
- Kendaraan bermotor roda dua dan sejenisnya dengan kapasitas mesin silinder mulai 250cc keatas.
- f. Kendaraan bermotor milik badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - g. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).

### 2.3.7 Contoh Perhitungan Tarif Progresif

Contoh disini saya akan menghitung perkiraan Pajak Innova diesel G 2012

(Baru):

$$\text{NJKB} = \text{Rp.198.000.000}$$

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times 1,5\% \text{ (Mobil Pertama)}$$

$$= \text{Rp.2.970.000}$$

Untuk kendaraan kedua berlaku Pajak progressif

$$\text{NJKB} = \text{Rp.198.000.000}$$

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times 2\% \text{ (mobil kedua)}$$

$$= \text{Rp.3.960.000}$$

Mobil ketiga dan seterusnya juga dikalikan berdasarkan tarif pajak progresif.

### 2.3.8 Perhitungan Pajak Untuk Golongan Kendaraan Bermotor

Contoh perhitungan pajak kendaraan angkutan umum

$$\text{NJKB} : \text{Rp.50.000.000}$$

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times 1,0\% \text{ (tarif pajak angkutan umum)}$$

$$= \text{Rp.500.000}$$

$$\text{Kemudian PKB angkutan umum Rp.500.000} + \text{SWDKLLJ Rp.143.000} =$$

$$\text{Rp.643.000 (pajak yang harus dibayar)}$$

Contoh perhitungan kendaraan mobil TNI / POLRI

$$\text{NJKB} : \text{Rp.170.000.000}$$

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times 0,55\% \text{ (tarif pajak kendaraan TNI / POLRI)}$$

$$= \text{Rp.935.000}$$

Kemudian PKB kendaraan mobil TNI / POLRI Rp.935.000 + SWDKLLJ

Rp.143.000 = Rp.1.078.000 (pajak yang harus dibayar)

Contoh perhitungan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar

NJKB : Rp.500.000.000

PKB = NJKB x 2% (tarif pajak kendaraan alat-alat berat )

= Rp.10.000.000

Kemudian PKB kendaraan alat-alat berat Rp.10.000.000 + SWDKLLJ Rp.143.000

= Rp.10.143.000 (pajak yang harus dibayar).

## **2.4 Dokumen Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.4.1 Dokumen Yang Digunakan**

Dokumen yang digunakan dalam penetapan status pajak kendaraan bermotor. dokumen ini berupa surat pajak yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a. Surat pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor (SPKPKB)
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk tagihan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar yang di tagihkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2%. Perbulan sejak pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan.



- d. Surat Peringatan pertama (SP1) adalah surat yang diterbitkan setelah 14 (empat belas) hari STPD diterbitkan, diterbitkan surat peringatan pertama.
- e. Surat Peringatan kedua (SP2) adalah surat yang diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari surat peringatan pertama tidak dibayar, diterbitkan surat peringatan kedua.

#### **2.4.2 Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor kemudian 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB Kepala Dinas menerbitkan SPKPKB (surat pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor) pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor dalam bentuk surat dan / atau elektronik.